

## ABSTRAKSI

**NAMA : TEOFILIUS WIBOWO SAKTI**  
**NIM : D2B007057**  
**JUDUL : POLITIK PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL  
PEMERINTAH TERHADAP KOMUNITAS ADAT  
TERPENCIL (KAT) DI DUKUH GEBANGSEWU,  
DESA BENTENGMATI, KECAMATAN MIJEN,  
KABUPATEN DEMAK**  
**JURUSAN/PS : ILMU PEMERINTAHAN/STRATA-1**

---

Penelitian ini bermaksud untuk melihat lebih jauh usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi KAT Gebangsewu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan memaparkan fakta dan melihat bagaimana usaha pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pelaksanaan program dan dijelaskan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program disertai dengan aspek politis dalam pelaksanaan program. Program-program yang diteliti mulai dari tahun 2004 sampai sekarang dikarenakan baru pada tahun 2004 Dukuh Gebangsewu dinyatakan sebagai Komunitas Adat Terpencil oleh pemerintah.

Lokasi penelitian berada di Dukuh Gebangsewu sendiri. Nilai historis dan mitos yang membuat Gebangsewu menjadi KAT dan bagaimana kondisi kesejahteraan sosial masyarakat Gebangsewu dijelaskan dalam tulisan ini.

Terdapat beberapa program yang dibuat oleh pemerintah bagi warga Gebangsewu baik program yang bersifat khusus terkait kondisi KAT Gebangsewu maupun program umum pemerintah yang dirasakan warga Gebangsewu. Pelaksanaan program maupun faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program akan dijelaskan dalam tulisan ini. Keterangan dari berbagai informan baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat juga akan dijelaskan, sehingga penjelasan bisa bersifat obyektif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan pemerintah masih terbatas dan banyak program yang belum dilaksanakan dengan baik. Beberapa program yang diberikan terhadap warga Gebangsewu banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Mitos yang berkembang di Gebangsewu menjadi hambatan dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial di Gebangsewu, faktor lain seperti kualitas SDM, terbatasnya sosialisasi dan lemahnya dukungan Pemerintah Daerah juga menjadi penghambat pelaksanaan program.

*Keyword* : program, hambatan, pendukung, politik

Semarang, 13 Juni 2011  
Dosen Pembimbing

Dra. Fitriyah, MA  
NIP. 19620327 198603 2 001